



KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DALAM PUSARAN FITNAH KUBRA

Nur Inayah¹, Nurzakia², Evi Aulia³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Email: nuri250407@gmail.com, nurzakia2007@gmail.com,
eviauliah324@gmail.com

ABSTRACT

The period of leadership under Ali bin Abi Thalib occurred amid a major internal crisis in the Muslim world referred to as Fitnah Kubra. This research focuses on exploring the causes, progression, and consequences of the conflict during his caliphate. Using a qualitative library research method with a historical perspective, the study reveals that Ali's administration experienced severe political pressures after the death of Utsman bin Affan. These pressures included demands to punish the perpetrators, instability within the government, and growing disunity among Muslims. Important events such as Perang Jamal and Perang Shiffin intensified divisions within the Islamic community and encouraged the emergence of movements such as Khawarij. In facing these circumstances, Ali maintained leadership principles rooted in justice, prudence, and adherence to Islamic values. The study ultimately finds that the Fitnah Kubra left enduring influences on the political structure and social life of the Muslim community.

Keywords: Leadership; Ali bin Abi Thalib; Fitnah Kubra; Muslim Society; Political Turmoil

ABSTRAK

Periode kepemimpinan di bawah Ali bin Abi Thalib terjadi di tengah krisis internal besar dalam dunia Muslim yang disebut sebagai Fitnah Kubra. Penelitian ini berfokus pada penjelajahan penyebab, perkembangan, dan konsekuensi dari konflik selama kekhalifahannya. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka kualitatif dengan perspektif sejarah, studi ini mengungkapkan bahwa pemerintahan Ali mengalami tekanan politik yang berat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Tekanan-tekanan ini mencakup tuntutan untuk menghukum para pelaku, ketidakstabilan di dalam pemerintahan, dan meningkatnya perpecahan di kalangan umat Muslim. Peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin memperdalam perpecahan dalam komunitas Islam dan mendorong munculnya gerakan-gerakan seperti Khawarij. Dalam menghadapi situasi tersebut, Ali mempertahankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berakar pada keadilan, kehati-hatian, dan kepatuhan pada nilai-

nilai Islam. Studi ini akhirnya menemukan bahwa Fitnah Kubra meninggalkan pengaruh yang bertahan lama pada struktur politik dan kehidupan sosial komunitas Muslim.

Kata kunci: Kepemimpinan; Ali bin Abi Thalib; Fitnah Kubra; Masyarakat Muslim; Gejolak Politik

PENDAHULUAN

Seusai wafatnya Utsman bin Affan, keadaan umat Islam mengalami perubahan yang sangat besar. Peristiwa terbunuhnya beliau menimbulkan keguncangan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Muslim. Situasi tersebut menjadi awal munculnya berbagai perselisihan di kalangan umat Islam yang kemudian berkembang menjadi konflik internal. Pada masa itu, umat Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Sebagian kelompok menginginkan agar pelaku segera dihukum, sedangkan kelompok lainnya berpendapat bahwa keamanan dan kestabilan pemerintahan harus dipulihkan terlebih dahulu. Perbedaan sikap tersebut membuat kondisi umat Islam semakin tidak menentu. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah untuk memimpin umat Islam. Namun, pengangkatannya tidak langsung diterima oleh seluruh pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa pendukungnya meminta agar para pembunuh Utsman dihukum terlebih dahulu sebelum memberikan dukungan penuh kepada Ali. Perselisihan ini akhirnya berkembang menjadi pertikaian politik yang cukup serius. Keadaan semakin rumit ketika terjadi peperangan antar sesama umat Islam, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin. Perang Jamal melibatkan pasukan Ali melawan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. Sementara itu, Perang Shiffin terjadi antara Ali dan Muawiyah. Konflik tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan melemahkan persatuan umat Islam. Dalam kehidupan masyarakat, kondisi sosial juga menjadi kurang harmonis.

Rasa persaudaraan di antara umat Islam mulai terganggu akibat perbedaan pandangan politik. Dari keadaan inilah muncul beberapa kelompok baru, salah satunya Khawarij, yaitu kelompok yang menolak hasil perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Walaupun menghadapi banyak konflik dan perpecahan, para pemimpin Islam tetap berusaha menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mempertahankan ajaran Islam. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga persatuan, mengutamakan keadilan, dan menyelesaikan perselisihan secara bijaksana.¹

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam menghadapi berbagai persoalan politik yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan

¹ Nabil Febriza, Afiqra, "Jurnal Pendidikan Tematik", no. 1 (2024): 58–71.

kaum Muslimin. Situasi ini bermula setelah wafatnya Utsman bin Affan yang terbunuh akibat pemberontakan. Peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan dan memunculkan perbedaan pendapat mengenai langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah Ali diangkat menjadi khalifah, tidak semua pihak langsung menerima kepemimpinannya. Sebagian umat Islam mendukung Ali karena dianggap memiliki ilmu, ketegasan, dan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi, ada juga kelompok yang meminta agar para pembunuh Utsman segera dihukum sebelum mereka memberikan baiat kepada Ali. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memicu ketegangan politik dalam pemerintahan Islam. Perselisihan tersebut akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Jamal. Dalam peperangan ini, pasukan Ali berhadapan dengan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. Kelompok tersebut menuntut agar pelaku pembunuhan Utsman segera diadili. Walaupun sempat diupayakan perdamaian, konflik tetap terjadi akibat meningkatnya ketegangan dan provokasi dari beberapa pihak. Peperangan ini menyebabkan banyak korban dan menjadi awal munculnya perpecahan besar di kalangan umat Islam. Tidak lama setelah itu, muncul kembali konflik lain yang dikenal sebagai Perang Shiffin antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah menolak mengakui kepemimpinan Ali sebelum kasus pembunuhan Utsman diselesaikan. Pertempuran berlangsung sengit hingga akhirnya pihak Muawiyah mengusulkan tahkim atau arbitrase dengan mengangkat mushaf Al-Qur'an sebagai simbol perdamaian. Sebagian pasukan Ali menerima usulan tersebut, meskipun Ali sendiri menyadari adanya kemungkinan tipu muslihat di baliknya.

Keputusan tahkim ternyata menimbulkan dampak yang lebih besar. Sebagian pendukung Ali merasa tidak setuju terhadap arbitrase tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Dari kelompok inilah kemudian muncul Khawarij, yaitu golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali dan menentang kedua pihak yang terlibat dalam tahkim. Kehadiran Khawarij semakin memperdalam konflik dan memperbesar perpecahan di tubuh umat Islam. Selain persoalan penegakan hukum atas wafatnya Utsman, konflik pada masa Ali juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Kebijakan Ali yang berusaha menegakkan keadilan, membenahi pemerintahan, dan mengganti pejabat-pejabat tertentu membuat sebagian elite merasa kehilangan kedudukan dan pengaruh mereka. Hal tersebut memunculkan penolakan terhadap kebijakan dan kepemimpinan Ali. Walaupun menghadapi situasi yang penuh gejolak, Ali tetap berusaha menjalankan pemerintahan secara adil dan bijaksana. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinannya memberikan pelajaran penting tentang bahaya perpecahan politik dan

pentingnya menjaga persatuan umat melalui musyawarah, keadilan, dan sikap saling menghargai.²

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berlangsung dalam keadaan umat Islam yang sedang mengalami krisis dan ketegangan setelah wafatnya Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman menyebabkan situasi politik menjadi tidak menentu dan menimbulkan keresahan di kalangan kaum Muslimin. Oleh sebab itu, umat Islam merasa perlu segera memilih pemimpin baru agar keamanan dan persatuan dapat kembali terjaga. Dalam kondisi tersebut, sejumlah sahabat senior diminta untuk bersedia memimpin umat Islam. Beberapa tokoh seperti Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Saad bin Abi Waqqas tidak bersedia menerima jabatan khalifah. Akhirnya, banyak umat Islam memberikan dukungan kepada Ali bin Abi Thalib karena beliau dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kecerdasan, keberanian, serta akhlak yang baik. Pada mulanya, Ali tidak langsung menerima permintaan tersebut. Ia menyadari bahwa keadaan umat Islam saat itu sedang dipenuhi konflik dan perselisihan sehingga jabatan khalifah menjadi amanah yang sangat berat. Namun, karena dorongan dari masyarakat dan para sahabat yang menginginkan adanya pemimpin untuk menenangkan keadaan, Ali akhirnya menerima baiat sebagai khalifah. Beberapa hari setelah wafatnya Utsman, Ali resmi diangkat menjadi khalifah keempat dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Proses baiat dilakukan di Madinah dan didukung oleh sebagian besar kaum Muhajirin dan Anshar. Pengangkatan Ali menjadi khalifah bertujuan untuk melanjutkan pemerintahan Islam serta menjaga ketertiban di tengah situasi yang sedang kacau. Meskipun demikian, tidak semua pihak langsung menerima kepemimpinan Ali. Sebagian sahabat memilih menunggu penyelesaian kasus pembunuhan Utsman sebelum memberikan dukungan penuh. Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk tokoh yang menolak membaiai Ali sebelum para pelaku pembunuhan Utsman dihukum. Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik politik yang semakin besar pada masa pemerintahan Ali. Walaupun menghadapi berbagai tantangan sejak awal pemerintahannya, Ali tetap berusaha menjalankan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab dan berpegang pada prinsip keadilan. Pengangkatannya sebagai khalifah menjadi bukti bahwa umat Islam pada saat itu berusaha mempertahankan persatuan dan keberlangsungan pemerintahan Islam di tengah keadaan yang penuh gejolak.³

² Selviana, Syamzan Syukur, and Rahmawati, "Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal Dan Perang Shiffin Pada Masa Ali Bin Abi Thalib," *Global Islamika: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2018): 1–11.

³ Zairina Fauziah, "khulafaur," 2024, 73–92.

Mempelajari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada masa krisis sangat penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai cara seorang pemimpin menghadapi keadaan yang penuh konflik dan tekanan. Masa pemerintahan Ali berlangsung ketika kondisi umat Islam sedang mengalami ketidakstabilan akibat berbagai persoalan politik dan perbedaan pendapat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Situasi tersebut menyebabkan munculnya perpecahan dan pertikaian di tengah masyarakat Muslim. Dalam keadaan yang sulit itu, Ali tetap berusaha memimpin dengan sikap bijaksana dan berpegang teguh pada prinsip keadilan. Berbagai konflik besar seperti Perang Jamal, Perang Shiffin, dan munculnya kelompok Khawarij menjadi ujian berat bagi kepemimpinannya. Meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Ali tetap mengutamakan perdamaian serta berusaha mencegah terjadinya pertumpahan darah yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu bersikap tenang, sabar, dan hati-hati dalam mengambil keputusan di masa krisis. Kepemimpinan Ali juga penting dikaji karena beliau memberikan contoh tentang tanggung jawab dalam menjaga persatuan umat. Sebagai khalifah, Ali berusaha mempertahankan stabilitas pemerintahan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dari sikap tersebut dapat dipahami bahwa seorang pemimpin yang baik harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan bersama. Selain itu, Ali dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Dalam menjalankan pemerintahan, beliau tidak membedakan kedudukan seseorang di hadapan hukum. Sikap tegas, jujur, dan amanah yang dimiliki Ali menjadi teladan penting dalam menciptakan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab.⁴

Mengkaji masa kepemimpinan Ali juga membantu memahami bagaimana konflik politik dapat memengaruhi persatuan masyarakat. Perpecahan yang terjadi pada masa itu menjadi bukti bahwa perbedaan pandangan yang tidak diselesaikan secara bijaksana dapat menimbulkan dampak besar bagi kehidupan umat. Oleh sebab itu, sejarah kepemimpinan Ali memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya musyawarah, toleransi, dan penyelesaian masalah secara damai. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib masih sangat relevan hingga sekarang. Sikap adil, sabar, tegas, dan mengutamakan persatuan dapat dijadikan contoh dalam menghadapi berbagai persoalan di kehidupan modern. Dengan mempelajari kepemimpinan beliau pada masa krisis, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga persatuan dan menyelesaikan

⁴ Khalifah Ali Bin Abi Thalib : Krisis Politik, Penataan Administrasi, Dan Konsep Keadilan, *El Fakhr* (STAIN Majene, 2025),

konflik dengan cara yang bijak demi terciptanya kedamaian dan kestabilan bersama.⁵

METHOD

Penelitian mengenai *Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam Pusaran Fitnah Kubra: Konteks, Dinamika, dan Dampaknya* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis untuk memahami secara mendalam berbagai peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Penelitian ini berfokus pada latar belakang munculnya konflik setelah wafatnya Utsman bin Affan, proses pengangkatan Ali sebagai khalifah, dinamika politik selama pemerintahannya, serta dampak konflik terhadap persatuan umat Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan peristiwa Fitnah Kubra. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menjelaskan fakta-fakta sejarah secara sistematis serta memahami hubungan antara peristiwa, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi guna memahami nilai-nilai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi krisis, menegakkan keadilan, dan menjaga persatuan umat Islam di tengah situasi politik yang penuh gejolak. ini.

RESULTS AND DISCUSSION

Konteks Munculnya Fitnah Kubra Pada Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Fitnah Kubra merupakan konflik besar yang terjadi dalam sejarah awal Islam dan menjadi awal munculnya perpecahan di kalangan umat Muslim. Peristiwa ini berakar dari kondisi politik dan sosial yang mulai tidak stabil pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan, lalu berlanjut pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Konflik tersebut tidak terjadi secara mendadak, melainkan berkembang akibat berbagai persoalan yang semakin meluas di tengah masyarakat Islam saat itu.⁶

Salah satu faktor yang memicu munculnya Fitnah Kubra adalah kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan yang mengangkat sejumlah anggota keluarganya

⁵ Elvi Wijayanti et al., "Al-Hasib : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam," n.d., 115–24.

⁶ Rahmat Hidayat et al., "Peristiwa Fitnah Kubro: Sejarah Dakwah Yang Harus Diluruskan," *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2025): 8–16, <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v5i1.826>.

untuk menduduki jabatan penting di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Kebijakan tersebut sebenarnya dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan karena orang-orang yang dipilih dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi negara. Namun, sebagian masyarakat menilai langkah itu sebagai bentuk keberpihakan kepada keluarga sendiri sehingga memunculkan tuduhan nepotisme. Persepsi tersebut menimbulkan rasa tidak puas dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat maupun sebagian tokoh politik.⁷

Di samping persoalan politik, keadaan sosial masyarakat Islam pada masa itu juga mengalami perubahan yang sangat besar. Wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat hingga meliputi berbagai daerah baru dengan latar belakang budaya dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Pertumbuhan wilayah tersebut membawa peningkatan ekonomi yang signifikan, tetapi pembagian kekayaan negara tidak dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Sebagian kelompok merasa kurang mendapatkan perhatian dan hak ekonomi yang seimbang sehingga memunculkan ketegangan sosial di beberapa wilayah.

Situasi yang sudah tidak stabil kemudian semakin memburuk akibat berkembangnya fitnah dan propaganda politik. Beberapa pihak memanfaatkan kondisi tersebut untuk memengaruhi masyarakat melalui penyebaran isu-isu negatif terhadap pemerintahan Utsman. Abdullah bin Saba' sering disebut sebagai salah satu tokoh yang menyebarkan hasutan dan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap khalifah. Melalui propaganda tersebut, masyarakat mulai terpengaruh dan memandang pemerintahan pusat di Madinah sebagai pihak yang tidak lagi menjalankan keadilan secara benar.⁸

Pada masa itu, penyebaran informasi masih dilakukan secara lisan sehingga kabar yang beredar sangat mudah berubah menjadi rumor dan fitnah. Tidak adanya sarana komunikasi resmi membuat masyarakat sulit memperoleh informasi yang benar. Akibatnya, berita yang belum jelas kebenarannya cepat menyebar ke berbagai daerah dan memicu kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini akhirnya mendorong munculnya pemberontakan yang berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan.⁹

Setelah wafatnya Utsman, umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekacauan dan membutuhkan pemimpin baru untuk mengendalikan situasi. Dalam kondisi tersebut, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Akan tetapi, kepemimpinannya dimulai ketika konflik dan ketegangan politik sedang memuncak. Sebagian kelompok mendesak agar para pelaku pembunuhan

⁷ Elyk Dwi Mumpuningtias2 Syaifurrahman Hidayat, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" 011 (2018): 219–30.

⁸ Syaifurrahman Hidayat.

⁹ Prosiding Working, Papers Series, and In Management, "1 2 1,2" 17, no. 01 (2026): 6–17.

Utsman segera dihukum, sedangkan Ali berpendapat bahwa keamanan negara harus dipulihkan terlebih dahulu agar konflik tidak semakin luas. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi penyebab utama munculnya Fitnah Kubra pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.¹⁰

Dinamika Politik, Sosial, dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu periode yang paling penuh gejolak dalam sejarah Islam. Sejak awal kepemimpinannya, Ali harus menghadapi situasi politik yang tidak stabil akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Islam terpecah ke dalam berbagai kelompok dengan kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda mengenai cara menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Dalam bidang politik, Ali berusaha menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam. Ia melakukan perubahan terhadap beberapa pejabat pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang ingin diterapkannya. Akan tetapi, langkah tersebut tidak diterima oleh semua pihak. Muawiyah, yang saat itu memimpin wilayah Syam, menolak mengakui kepemimpinan Ali sebelum pembunuh Utsman dijatuhi hukuman. Penolakan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik politik yang besar dan memicu terjadinya Perang Shiffin.

Perbedaan pendapat mengenai penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik politik pada masa Ali. Sebagian kelompok menilai bahwa para pembunuh Utsman harus segera dihukum tanpa penundaan, sedangkan Ali memandang bahwa keadaan negara yang sedang tidak stabil membuat tindakan tersebut berisiko menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Perbedaan cara pandang terhadap konsep keadilan ini akhirnya menyebabkan pertentangan politik yang semakin sulit diselesaikan.¹¹

Dari sisi sosial, masyarakat Islam pada masa itu sedang mengalami perubahan besar akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam. Kehidupan masyarakat yang sebelumnya sederhana berubah menjadi lebih kompleks karena bertemunya berbagai budaya dan kelompok sosial dari wilayah-wilayah baru. Perubahan tersebut memunculkan tantangan baru bagi pemerintahan, terutama dalam menjaga persatuan dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat yang semakin beragam.

¹⁰ Pepi Yanti et al., "Korespondensi Penulis 744" 2, no. 7 (2024): 744–60.

¹¹ Nursaadah Saad dan Mohammad Adjisama Sulong, "Konflik politik semasa pemerintahan 'Ali ibn Abi Talib," *Jurnal Al-Jami'ah* 59, no. 1 (2021): 45, <http://journalarticle.ukm.my/17697/>

Masalah ekonomi juga ikut memengaruhi dinamika sosial saat itu. Meskipun kekayaan negara meningkat akibat perluasan wilayah Islam, tidak semua masyarakat merasakan hasilnya secara merata. Ketimpangan ekonomi ini memunculkan kecemburuan sosial yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda politik dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Selain itu, lemahnya sistem komunikasi membuat penyebaran informasi sulit dikendalikan. Berita yang disampaikan secara lisan sering kali berubah dan berkembang menjadi fitnah. Masyarakat yang tidak memperoleh informasi yang jelas akhirnya mudah percaya pada isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Situasi inilah yang membuat ketegangan sosial dan politik semakin membesar hingga berkembang menjadi konflik terbuka dalam tubuh umat Islam.

Secara keseluruhan, dinamika politik dan sosial pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib memperlihatkan bahwa konflik dapat muncul akibat perpaduan antara masalah politik, ketidakstabilan sosial, ketimpangan ekonomi, serta penyebaran fitnah yang tidak terkendali. Meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit, Ali tetap berusaha menjalankan pemerintahan dengan berpegang pada prinsip keadilan, persatuan, dan nilai-nilai moral Islam.¹²

Dampak Fitnah Kubra Terhadap Persatuan Umat Islam

Fitnah Kubra membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan umat Islam, terutama dalam hal persatuan dan stabilitas politik. Konflik yang sebelumnya hanya berupa ketegangan politik akhirnya berubah menjadi peperangan terbuka antara sesama Muslim. Peristiwa ini menjadi titik awal terjadinya perang saudara pertama dalam sejarah Islam dan meninggalkan luka yang mendalam di tengah masyarakat Muslim.¹³

Salah satu dampak utama dari Fitnah Kubra adalah terjadinya Perang Jamal. Konflik ini melibatkan pasukan Ali bin Abi Thalib dengan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. Peperangan tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai cara menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Masing-masing kelompok merasa memiliki tujuan yang benar demi menegakkan keadilan, tetapi perbedaan cara pandang itu justru menimbulkan konflik yang menyebabkan banyak korban jiwa dan memperbesar perpecahan di kalangan umat Islam.¹⁴

¹² Nur Annisa Yulia et al., "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 1 (2024): 124–34, h

¹³ Siti Rahma Hardiyanti, "Jurnal Pendidikan Ips," *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia* Vol. 12, N, no. Konflik Ukraina-Rusia (2022): 39–48, <https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>.

¹⁴ Hervina Nathasya, "No TitleEΛENH," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

Konflik berikutnya adalah Perang Shiffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah menolak memberikan baiat kepada Ali sebelum pelaku pembunuhan Utsman dihukum. Ketika peperangan berlangsung tanpa hasil yang pasti, kedua pihak sepakat melakukan tahkim atau arbitrase sebagai jalan penyelesaian. Akan tetapi, keputusan tersebut justru menimbulkan masalah baru karena sebagian pendukung Ali menolak hasil tahkim dan keluar dari kelompoknya. Mereka kemudian membentuk kelompok Khawarij yang menganggap penyelesaian melalui arbitrase manusia bertentangan dengan hukum Allah.¹⁵

Munculnya Khawarij menjadi awal lahirnya berbagai kelompok politik dan pemikiran dalam Islam. Perpecahan umat semakin dalam karena masyarakat mulai terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik dan keagamaan berbeda. Dari konflik inilah kemudian berkembang kelompok pendukung Ali yang dikenal sebagai Syiah dan kelompok lain yang memiliki pandangan tersendiri mengenai kepemimpinan Islam.

Selain menyebabkan perpecahan politik, Fitnah Kubra juga berdampak pada melemahnya stabilitas pemerintahan Islam. Konflik yang terus terjadi membuat perhatian pemerintah tersita untuk menghadapi pertikaian internal sehingga kondisi keamanan negara menjadi terganggu. Di sisi lain, rasa saling curiga dan ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat semakin meningkat sehingga hubungan persaudaraan sesama Muslim menjadi melemah.

Peristiwa Fitnah Kubra juga meninggalkan trauma sejarah yang sangat mendalam bagi umat Islam. Pembunuhan terhadap seorang khalifah dan perang saudara antar sesama Muslim menjadi pengalaman pahit yang menunjukkan bahwa fitnah dan perebutan kekuasaan dapat menghancurkan persatuan umat. Oleh sebab itu, peristiwa ini sering dijadikan pelajaran penting mengenai bahaya perpecahan dan pentingnya menjaga persatuan, keadilan, serta penyebaran informasi yang benar di tengah masyarakat.

CONCLUSION

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu periode yang paling penuh tantangan dalam sejarah Islam. Beliau memimpin umat Islam dalam kondisi politik yang tidak stabil setelah wafatnya Utsman bin Affan akibat pemberontakan. Situasi tersebut menyebabkan munculnya perpecahan di kalangan umat Islam dan memunculkan berbagai konflik politik maupun sosial. Dalam kondisi yang penuh tekanan itu, Ali bin Abi Thalib tetap berusaha

¹⁵ Nini Ismayani and Umar Sulaiman, "Dampak Dan Relevansi Dinamika Politik Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dengan Konflik Politik Yang Terjadi Di Negara-Negara Muslim Era Moderen," 2026, 2657-70.

menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan, persatuan, dan nilai-nilai Islam. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu bersikap tenang dan bijaksana ketika menghadapi krisis yang besar.

Salah satu gambaran utama kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah sikapnya yang mengutamakan stabilitas negara dibandingkan kepentingan kelompok tertentu. Setelah diangkat menjadi khalifah, beliau menghadapi tuntutan dari sebagian masyarakat agar segera menghukum para pembunuh Utsman. Namun, Ali memandang bahwa kondisi negara saat itu masih kacau sehingga penegakan hukum secara terburu-buru dapat memicu konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, beliau memilih memulihkan keamanan dan memperkuat pemerintahan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Sikap ini memperlihatkan bahwa Ali memiliki pandangan politik yang hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap persatuan umat Islam.

Dalam menghadapi konflik, Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai pemimpin yang tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan. Meskipun menghadapi tekanan dari berbagai kelompok politik, beliau tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Ali berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan menghindari pertumpahan darah antar sesama Muslim. Hal ini terlihat ketika beliau menghadapi Perang Jamal yang melibatkan tokoh-tokoh besar Islam seperti Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. Walaupun perang tidak dapat dihindari, Ali tetap berusaha menjaga persaudaraan Islam dan tidak menjadikan konflik sebagai sarana balas dendam politik.¹⁶

¹⁶ Yulia et al.

REFERENCES

- Alho Fauziah, Zairina. "Khulafaur," 2024, 73–92.
- Febriza, Afiqra, Nabil. "Jurnal Pendidikan", no. 1 (2024): 58–71.
- Hardiyanti, Siti Rahma. "Jurnal Pendidikan Ips." *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia* Vol. 12, no. Konflik Ukraina-Rusia (2022): 39–48. <https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>.
- Hidayat, Rahmat, Daud Rasyid, Riska Ramdani, Rambang Basari, dan Retna Dwi Estuningtyas. "Peristiwa Fitnah Kubro: Sejarah Dakwah Yang Harus Diluruskan." *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2025): 8–16. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v5i1.826>.
- Ismayani, Nini, and Umar Sulaiman. "Dampak dan Relevansi Dinamika Politik Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dengan Konflik Politik Yang Terjadi Di Negara-Negara Muslim Era Moderen," 2026, 2657–70.
- Khalifah Ali Bin Abi Thalib: Krisis Politik, Penataan Administrasi, Dan Konsep Keadilan. *El Fakhru*, STAIN Majene, 2025. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/elfakhru/article/view/1951>.
- Nathasya, Hervina. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Saad, Nursaadah, dan Mohammad Adjisama Sulong. "Konflik politik semasa pemerintahan 'Ali ibn Abi Talib." *Jurnal Al-Jami'ah* 59, no. 1 (2021): 39–58. <http://journalarticle.ukm.my/17697/>.
- Selviana, Syamzan Syukur, and Rahmawati. "Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin Pada Masa Ali Bin Abi Thalib." *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2018): 1–11.
- Syaifurrahman Hidayat, Elyk Dwi Mumpuningtias2. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" 011 (2018): 219–30.
- Wijayanti, Elvi, Nova Arya, Elvi Wijayanti, Nova Arya, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Al-Hasib : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam," n.d., 115–24.
- Yanti, Pepi, dan M Djamil Djambek. "Korespondensi Penulis 744" 2, no. 7 (2024): 744–60.
- Yulia, Nur Annisa, Pasassung n, Ekadayanti, and Ahmad. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 1 (2024):124–34.